

Kasus Covid-19 Naik, RS di Bandung Diminta Tambah Tempat Tidur

BANDUNG (IM)- Dinas Kesehatan Kota Bandung meminta seluruh rumah sakit untuk menambah tempat tidur di tengah kondisi kasus Covid-19 naik. Penyebaran Covid-19 di Kota Bandung sudah menembus angka 1.000.

“Kasus terus naik tiap hari sudah menembus di angka 1.000 barangkali prinsip ada kenaikan kasus,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Anhar Hadian, Kamis (24/11).

Ia menuturkan keterisian tempat tidur bagi pasien di rumah sakit sudah mencapai 20 persen. Oleh karena itu pihaknya mengimbau dan meminta rumah sakit untuk menambah tempat tidur bagi pasien Covid-19.

“Satgas sudah menyampaikan dan instruksi ke rumah sakit untuk menambah tempat tidur untuk Covid-19, baru 600 sekian agar ditambah persentase supaya lebih memadai,” katanya.

Anhar melanjutkan pihaknya berupaya menganti-

tipasi penyebaran Covid-19 lebih tinggi jelang akhir tahun. Salah satunya mengimbau masyarakat mengurangi mobilitas dan berkerumun.

Selain itu kegiatan atau event di akhir tahun akan dibatasi. “Masyarakat agar mengurangi kerumunan, tindakan nyata sudah ada misal event kegiatan yang mengajukan perizinan oleh satgas dibatasi jumlah. Kalau kapasitas lapangan untuk konser 1.000, kalau dulu 3.000 yang datang sekarang 300,” katanya.

Anhar melihat euforia masyarakat saat ini sangat tinggi. Pihaknya juga mengencakan vaksinasi Covid-19 namun saat ini masyarakat relatif minim untuk divaksin. “Vaksin melimpah tapi tidak laku masih 51 persen, rata-rata mereka yang ingin yang melakukan perjalanan,” katanya.

Ia mengatakan pihaknya terus menggenjot trasing, testing dan treatment. Selain itu mengencakan vaksinasi di event-event seperti konser.

● pra

Dinas PUPR Kota Bogor Godok RDTR untuk Tiga Wilayah Kota Bogor

BOGOR (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tengah menggodok rancangan peraturan wali kota tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk tiga Wilayah Perencanaan (WP). Ketiganya adalah RDTR WP B, WP C dan WP E yang sekarang tahap konsultasi publik. Konsultasi publik pertama dilakukan di ballroom Hotel Royal Pajajaran, Kecamatan Bogor Tengah pada Rabu (23/11) sore.

Dalam kegiatan itu diikuti seluruh stakeholder terkait, di antaranya Kementerian ATR/BPN, Bappeda Jawa Barat, DBMPR Jawa Barat, DPUPR kota dan kabupaten Bogor. Selain itu hadir asosiasi sekolah perencana dan pelaku ekonomi di Kota Bogor. “Konsultasi publik pertama ini rangkaian dan pembuatan dokumen RDTR WP B, WP C dan WP E. WP B ini Bogor Barat, WP C Bogor Utara dan WP E Ciawi (Bogor Selatan),” ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bogor, Chusnul Rozaqi didampingi Kasi Tata Ruang, Latif Priyadi.

Chusnul menambahkan, RDTR untuk tiga WP ini menyesuaikan kepada Perda 6/2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Namun

RDTR ini bersifat detail. Sementara untuk RDTR WP A dan WP D telah selesai tahun lalu. Namun ada perbaikan dikarenakan waktu itu ada keterlambatan RTRW. “Mudah-mudahan tahun depan bisa selesai semua dalam rencana untuk pemanfaatan ruangnya,” tambahnya.

Chusnul menjelaskan, bahwa masing-masing WP tentunya memiliki perbedaan fungsi dalam pembangunan. Setiap WP berbeda-beda, seperti di Bogor Utara ada kegiatan bisnis baru OCBD, sementara di Bogor Barat itu agroekowisata termasuk di Bogor Selatan.

“Sedangkan di Bogor Tengah ini tetap sebagai pusat pemerintahan. Pengembangan nanti di Bogor Timur ada masuk di WP E,” jelasnya.

Chusnul memaparkan, setelah ini dilanjutkan konsultasi publik kedua. Dalam kegiatan itu ada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang disetujui oleh Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat. “Kemudian rekombuk masuk ke persetujuan lintas sektor yang ada di Kementerian ATR/BPN, selanjutnya Kemendagri dan lainnya. Terakhir persetujuan subsidi dan setelah itu baru penetapan perwali (RDTR),” pungkasnya. ● jai

8 | Nusantara



AKSES JALAN LONGSOR CIANJUR SUDAH BISA DILALUI KENDARAAN

Sejumlah kendaraan melintas di Jalan Raya Puncak-Cianjur, Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kamis (24/11). Akses jalan yang sebelumnya putus akibat longsor, kini sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda dua ataupun roda empat di kedua arah.

Gubernur Jabar Tugaskan Kadis Jadi ‘Bapak Asuh’ Korban Gempa Cianjur

Bapak asuh ini harus menjamin semua kebutuhan dan suplai bantuan sampai kepada warga. Hari ini sudah saya putuskan setiap kecamatan punya bapak asuh dinas-dinas dari Pemda Provinsi Jabar, ujar Gubernur Jabar, Ridwan Kamil.

BANDUNG (IM)

Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil menugaskan kepala dinas dan pejabat setingkat di Pemerintah Provinsi Jabar untuk turun ke kecamatan menjadi bapak asuh korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur.

“Bapak asuh ini harus men-

jamin semua kebutuhan dan suplai bantuan sampai kepada warga. Hari ini sudah saya putuskan setiap kecamatan punya bapak asuh dinas-dinas dari Pemda Provinsi Jabar,” ujar Ridwan Kamil dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/11).

“Jadi satu kecamatan di Cian-

jur akan ada dua dinas, dipimpin kepala dinas untuk bertanggung jawab mengurus semua kebutuhan warga di 12 kecamatan terdampak,” tambahnya.

Gubernur telah memerintahkan Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja untuk mengatur manajemen di lapangan terkait sistem bapak asuh.

“Dan sudah diatur oleh Pak Sekda cara konkretnya seperti apa,” kata Ridwan Kamil.

Gubernur mengungkapkan bahwa Pemda Provinsi Jabar pun telah menggelontorkan anggaran Rp2 miliar untuk kebutuhan logistik bagi korban gempa di pengungsian.

“Tadi pagi kita membelanjakan Rp2 miliar dari provinsi

untuk membeli kebutuhan di pengungsian,” ujar Gubernur.

“Kemudian BTT Rp20 miliar sudah kita siapkan untuk kebutuhan tanggap darurat. Walaupun komitmen dari Presiden untuk rekonstruksi (bangunan) yang Rp50 juta (rusak) berat, Rp25 juta (rusak) sedang, dan (rusak) ringan Rp10 juta terus kita sosialisasikan. Itu uang dari BNPB anggaran APBN,” lanjutnya.

Untuk biaya pengobatan bagi korban yang terdampak bencana gempa bumi Cianjur, Gubernur Ridwan Kamil menyebut semua tagihan digratiskan dan akan ditanggung oleh Pemda Provinsi Jabar.

“Semua tagihan digratiskan

dan ditujukan ke Pemda Provinsi Jabar, karena terjadi eksekusi ada yang ditagih Rp4 juta - Rp5 juta. Korban sudah susah, hartanya terpendam di rumah yang rubuh, masih dimintai bayaran,” katanya.

Ia menegaskan, semua asosiasi rumah sakit bahkan disaksikan langsung oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, tidak perbolehkan menagih biaya perawatan atau apapun itu kepada korban.

“Sekarang sudah clear semua asosiasi rumah sakit, ada Pak Menkes sebagai saksi, tidak boleh menagih ke korban. Tagihnya ke pemda dengan bukti tagihannya,” kata Ridwan Kamil. ● pra

Pemkab Bogor Susun PKPT untuk Optimalkan Pengawasan Perangkat Daerah

BOGOR (IM)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, melakukan Penyusunan Rumusan Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Resiko Tahun 2023, yang diselenggarakan di Bigland Sentul Hotel, Babakanmadang, Kabupaten Bogor, Rabu (23/11) kemarin.

Gelaran ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan

pengawasan dan pengawasan seluruh program dan kegiatan perangkat daerah mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawabannya.

Untuk diketahui, dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI), Inspektur harus menyusun Kebijakan dan Prosedur Pengawasan serta Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko untuk menetapkan prioritas peng-

awasan intern sesuai dengan tujuan organisasi.

Pt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengungkapkan, Inspektur selaku APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) bertugas membantu Bupati dalam membina dan pengawasan soal pemerintahan dan menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan perangkat daerah dan pemerintahan desa melalui pendekatan dan sistematis, mengevalu-

asi dan penindakan aktivitas yang berisiko dan menangani internal.

Berikan pelayanan kepada masyarakat jangan pilih-pilih, karena negarawan tidak melihat memilih atau tidak memilih. Terlebih sekarang ini desa adalah menjadi salah satu primadona bagi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten untuk berlomba-lomba memberikan bantuan kepada desa. “Tinggal bagaimana desa

mengelolanya, bangun sinergitas dengan BPD, bangun komunikasi dengan lintas desa. Kemudian komunikasi dengan Camat dan ingat Camat itu adalah perpanjangan langsung dari bupati yang ditugaskan untuk mengawasi dan melaksanakan pemerintahan di tingkat kecamatan dan juga membantu mengawasi pemerintahan di tingkat desa,” tandasnya. ● gio

Polres Bogor Bantu Masyarakat Terdampak Gempa Bumi di Cianjur

BOGOR (IM)- Polres Bogor dan jajaran terus berupaya membantu korban bencana gempa bumi Cianjur, tyang menghentakkan semua kalangan masyarakat.

Untuk itu, Polres Bogor menerjunkan jajarannya yakni trauma heling, pos bencana, dan memasok bantuan sosial bagi masyarakat terdampak gempa bumi di wilayah Kabupaten Cianjur hingga Kamis dini hari (24/11).

Sejumlah kendaraan dari jajaran Polres Bogor berlalu lalang mengangkut berbagai bahan kebutuhan pokok yang

diperuntukkan bagi masyarakat korban gempa.

Kapolres Bogor, AKBP Dr. Imam Imanuddin SH SIK MH mengatakan bahwa hingga Kamis dini hari, pihaknya terus berupaya mendatangkan berbagai kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat terdampak korban gempa.

“Dari hari pertama kejadian, hingga saat ini kita terus datangkan kebutuhan pokok mulai dari beras, mie instan, telur, kasur, selimut, obat-obatan, air bersih, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya,” ujar Imanuddin, di lokasi bencana, Cianjur, Kamis

(24/11).

Bantuan tersebut, jelas Imanuddin, langsung distribusikan kepada seluruh masyarakat. Selain itu ada juga yang dimasak di posko Polres Bogor terlebih dahulu, kemudian baru dibagikan kepada masyarakat.

Imanuddin menyampaikan, bagi masyarakat korban gempa di wilayah Cianjur yang membutuhkan kebutuhan pokok, bisa juga langsung mendatangi Posko Polres Bogor yang didirikan di Jalan Simpang Galudra, Kecamatan Cugenang, Cianjur, katanya. ● gio

Tersangka Korupsi BTT Jual Rumah untuk Kembali Kerugian Negara

CIBINONG (IM)- Setelah menyerahkan diri, tersangka dugaan korupsi dana bantuan bencana alam atau belanja tak terduga (BTT) tahun anggaran 2017 yaitu Sumardi akan menjual rumahnya.

Uang hasil jual rumah Sumardi di sebuah perumahan, di Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong tersebut untuk menutupi atau mengembalikan kerugian nega sebesar Rp 1,7 miliar.

“Tersangka Sumardi kami berikan waktu untuk menjual rumahnya, dia sudah mulai memiliki itikad baik untuk membayar kerugian negara yang diakibatkan oleh ulahnya,” kata Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Dodi Wiratmaja kepada wartawan, Kamis (24/11).

Dodi Wiratmaja menerangkan, selain rumah, negara juga akan mendapatkan uang dari hasil lelang unit kendaraan roda empat milik tersangka Sumardi, yang sebelumnya disita bersama tersangka Dian Ade Putra Harahap dan uang tersangka Sumardi yang sebelumnya juga disita dari rumahnya sebesar Rp 129 juta.

“Dian Ade Putra Harahap merupakan keponakan Sumardi, yang selama ini membantu pelariannya. Dari tangannya, kami mensita kendaraan roda empat Toyota Fortuner yang tahun produksinya 2019. Dari hasil lelang kendaraan tersebut, negara

setidaknya akan mendapatkan pengembalian kerugian negara Rp 350 juta. Kami meminta, tuntutan ganti rugi ini dipenuhi, dan dampak positifnya ia bisa mendapatkan keringanan hukuman penjara,” terang Dodi Wiratmaja.

Ia menjelaskan, baik tersangka Sumardi yang merupakan mantan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor dan Dian Ade Putra Harahap, berkasnya sedang dibuat surat dakwaan, jika sudah P21, maka akan segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Kota Bandung.

“Segera berkas kedua tersangka kami rampungkan, untuk segera disidang di Pengadilan Tipikor,” jelasnya.

Jika Sumardi, dijerat dengan tuntutan ganti rugi (TGR), sesuai Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 dan Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP, di mana hukuman penjaranya minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun.

Dian Ade Putra Harahap, dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang (UU) nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau tepatnya obstruction justice dengan ancaman hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 7 tahun. ● gio



PENCAIRAN BLT BAGI ORGANDA GARUT

Warga penerima manfaat menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kantor Organda Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis (24/11). Pemerintah memberikan BLT pengalihan subsidi BBM kepada 2.796 anggota Organisasi Angkatan Darat (Organda) Kabupaten Garut, diantaranya sopir angkutan umum, delman, becak, ojek online dan pangkalan sebesar Rp450 ribu.

Pelajar Tenggelam di Danau Bonardo, Ditemukan Telah Meninggal Dunia

BOGOR (IM)- Siswa SMK bernama Dafri Faraji (17), yang tenggelam di danau Bonardo, wilayah Desa Cipeucang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Rabu sore (23/11), Kamis (24/11) pagi ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa oleh Tim gabungan Polsek Cileungsi Polres Bogor, Koramil Cileungsi, Dislabair Koarmada 1 TNI AL, Basarnas, Damkar, BPBD, Sat Pol PP, Pemdes Cipeucang.

Kapolsek Cileungsi, Kompol Zulkarnaen menjelaskan bahwa kejadian trnggelamnya siswa tersebut berawal saat korban bersama temannya ini menaiki rakit yang berada di danau Bonardo pada Rabu sore sekitar pukul 15.30 WIB. Namun saat berada di tengah-tengah danau rakit yang dinaiki korban dan seorang temannya ini hilang keseimbangan hingga membuatnya terjatuh ke dalam danau.

Dipaparkan, teman korban yang berenang ke tepi danau berhasil menyelamatkan diri, sedangkan korban yang mengalami kepanikan tidak dapat menyelamatkan diri hingga tenggelam. Saat kejadian rekan-rekan korban pun mencoba melakukan pencarian namun tidak membuahkan hasil.

“Pencarian terhadap korban yang kita lakukan bersama tim gabungan sejak kemarin akhirnya membuahkan hasil, korban berhasil kita temukan pada Kamis pagi (24/11) pagi ini sekitar pukul 07.00 WIB dalam kondisi meninggal dunia,” ujar Kapolsek Cileungsi, kemarin.

Lebih lanjut Zulkarnaen menyebutkan, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka yang berada di perumahan Citra Indah Kecamatan Jonggol. Kemudian jenazah langsung dimakamkan keluarga di pemakaman Cileungsi. ● gio



Polres Bogor salurkan bantuan sembako kepada warga terdampak gempa bumi di Cianjur.